LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2023 dapat kami selesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini kami buat untuk memberikan informasi tentang kebijakan Dinas Pariwisata Kota Denpasar yang belum dan sudah dilaksanakan, menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini kami susun, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terimakasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang..... 2
2. Tujuan dan Manfaat 2
3. Ruang Lingkup 3

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 3

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP 3
3. Metode Pelaksanaan FKP..... 3
4. Susunan Acara FKP..... 4

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 4

1. Identifikasi Masalah..... 5
2. Analisis..... 5
3. Rencana Aksi..... 6

D. PENUTUP 7

LAMPIRAN PHOTO KEGIATAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pelibatan masyarakat lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standard pelayanan sampai evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Untuk itu dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

a. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik,

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan,
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Manfaat :

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang pariwisata , dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
5. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting pada hari Rabu, 18 Januari 2023 pukul 10.00 Wita-selesai.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara : Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Peserta FKP : OPD terkait dan stakeholder pariwisata Kota Denpasar

3. Metode Pelaksanaan FKP

Secara virtual melalui zoom meeting antara Dinas Pariwisata selaku narasumber dengan OPD terkait dan Stakeholder pariwisata pengguna layanan di Kota Denpasar. Dinas Pariwisata Kota Denpasar selaku narasumber memberikan pemaparan dan sosialisasi mengenai kebijakan dalam pelayanan publik yang akan atau sudah ditetapkan.

4. Susunan Acara FKP

WAKTU	ACARA	PELAKSANA
10.00 - 10.10	Registrasi Peserta	Panitia
10.10 - 10.15	Pembukaan dan Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Forum Kosultasi Publik 2023	Kepala Dinas Pariwisata
10.15 - 10.30	Paparan dari Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
10.30 - 10.45	Paparan dari Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
10.45 - 11.15	Diskusi dan Tanya Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder
11.15 - 11.30	Perumusan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik	Tim Teknis
11.30 - 11.45	Penutupan	Kepala Dinas Pariwisata

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

1. Jumlah standar pelayanan (SP) pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar berjumlah 3 layanan.
2. Kegiatan Lomba Dokar Hias perlu kembali dilakukan, sarana-prasana Dokar perlu ditingkatkan, dan pemeriksaan kesehatan Dokar agar dilakukan berkelanjutan.
3. Penyebaran informasi rute Bus Trans Metro Dewata yang telah melalui jalur Daya Tarik Wisata perlu diperluas penyebarannya.
4. Perlunya peningkatan kapasitas pengembangan Destinasi Pariwisata (Atraksi, fasilitas pendukung dan promosi).
5. Kegiatan wisata Healty Tourism dan MICE terus dikembangkan
6. Kualitas sarana prasarana dan kebersihan Gedung Dharmanegara Alaya masih perlu ditingkatkan

7. Penting menyebarkan bahan promosi pariwisata baik video, photo dan informasi lainnya yang sudah diperbaharui kepada stakeholder pariwisata
8. Pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan Road Map yang sudah dibuat, pengembangannya perlu lebih disinergikan.
9. Memperluas jaringan promosi pariwisata melalui kerja sama dengan daerah lain sangat diperlukan

2. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dapat di analisa sebagai berikut:

1) Diperlukan koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait untuk melakukan pengembangan dan perbaikan pelayanan Wisata Dokar.
2) Diperlukan tindak lanjut memperluas penyebaran informasi rute Bus Trans Metro Dewata yang melewati DTW pada bahan-bahan promosi yang dibuat.
3) Kapasitas Destinasi Wisata secara terus menerus dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
4) Dukungan pengembangan Healty Tourism dan MICE mesti terus dilanjutkan terutama pada area pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Sanur dan Kawasan Ekonomi Khusus Serangan.
5) Pentingnya peningkatan kualitas sarana-prasarana DNA dengan berkoordinasi Bersama Bappeda dan peningkatan kulaitas kebersihan DNA
6) Bahan promosi pariwisata yang sudah diperbaharui agar terus disebarkan kepada stakeholder pariwisata.
7) Perlunya penguatan kerjasama dan koordinasi antar OPD dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengembangakan pariwisata budaya yang berkelanjutan di Kota Denpasar.
8) Berkoordinasi dengan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar untuk memperluas jaringan promosi pariwisata.

4. Rencana Aksi

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penjelasan
1.	Jumlah standar pelayanan (SP) pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar berjumlah 3 layanan.	Standar Pelayanan (SP) tidak mengalami perubahan	Standar Pelayanan (SP) telah diinformasikan kepada Publik melalui Forum Komunikasi Publik Dinas Pariwisata tanggal 18 Januari 2023
2.	Kegiatan Lomba Dokar Hias perlu kembali dilakukan, sarana-prasana Dokar perlu ditingkatkan, dan pemeriksaan kesehatan Dokar agar dilakukan berkelanjutan.	Diperlukan koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait untuk melakukan perbaikan pelayanan.	Koordinasi dengan Bappeda terkait anggaran penyelenggaraan Dokar Hias dan Dinas Kesehatan terkait kesehatan Kuda untuk kegiatan Wisata Dokar
3.	Penyebaran informasi rute Bus Trans Metro Dewata yang telah melalui jalur Daya Tarik Wisata perlu diperluas penyebarannya.	Diperlukan tindak lanjut memperluas penyebaran informasi rute Bus Trans Metro Dewata yang melewati DTW pada bahan-bahan promosi yang dibuat.	Tindak lanjut dengan menyebarkan informasi terkait pada bahan-bahan promosi yang dibuat.
4.	Perlunya peningkatan kapasitas pengembangan Destinasi Pariwisata (Atraksi, fasilitas pendukung dan promosi).	Kapasitas Destinasi Wisata secara terus menerus dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia.	Berkolaobarasi dengan stakeholder pariwisata dan OPD terkait untuk mengembangkan kapasitas Destinasi.
5.	Kegiatan wisata Healty Tourism dan MICE terus dikembangkan	Dukungan pengembangan Healty Tourism dan MICE mesti terus dilanjutkan terutama pada area pengembangan KEK Kesehatan dikawasan Sanur dan KEK diseputar Serangan.	Memberikan dukungan terus menerus baik dalam bentuk informasi maupun promosi pengembangan Healty Tourism dan MICE dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata Kota Denpasar

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Penjelasan
6	Kualitas sarana prasarana dan kebersihan Gedung Dharmanegara Alaya masih perlu ditingkatkan	Pentingnya peningkatan kualitas sarana-prasarana DNA dengan berkoordinasi Bersama Bappeda dan peningkatan kualitas kebersihan DNA	Koordinasi dengan Bappeda terkait peningkatan pemeliharaan Gedung DNA dan koordinasi dengan UPTD Pusat pelayanan Ekonomi Kreatif (DNA) terkait peningkatan kualitas kebersihan gedung DNA.
7.	Penting menyebarkan bahan promosi pariwisata baik video, photo dan informasi lainnya yang sudah diperbaharui kepada stakeholder pariwisata	Bahan promosi pariwisata yang sudah diperbaharui agar terus disebarkan kepada stakeholder pariwisata.	Ditindaklanjuti Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata untuk memperbaharui dan menyebarkan informasi terkait.
8.	Pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan Road Map yang sudah dibuat, pengembangannya perlu lebih disinergikan.	Perlunya penguatan kerjasama dan koordinasi antar OPD dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengembangakan pariwisata budaya yang berkelanjutan di Kota Denpasar.	Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan Stakeholder Pariwisata dan OPD terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan di Kota Denpasar.
9.	Diperlukan memperluas jaringan promosi pariwisata melalui kerja sama.	Bagian Kerjasama akan membantu memperluas kerjasama promosi pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Budaya di Kota Denpasar	Meningkatkan kerjasama dengan Bagian Kerjasama untuk memperluas jaringan kerjasama promosi pariwisata.

D. PENUTUP

Demikian laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan sebagai tindak lanjut perbaikan pelayanan pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar.

Sekian dan terimakasih.

Kepala Dinas Pariwisata

Kota Denpasar,

Ir. M.A. Dezire Mulyani, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630502 199403 2 006

PHOTO KEGIATAN